Nama : Arnesta Az Zahra

NPM : 2313031066

Mata Kuliah : ASP

**Buatlah soal 10 pilihan ganda terkait dengan ASP**

1. Dalam konteks akuntansi sektor publik, sebuah pemerintah daerah menerima hibah dari pemerintah pusat senilai Rp 100 miliar untuk proyek infrastruktur, tetapi hibah tersebut baru akan dicairkan setelah proyek dimulai. Berdasarkan SAP, bagaimana pemerintah daerah sebaiknya mengakui hibah ini untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, mengingat prinsip basis akrual yang menekankan pengakuan atas hak dan kewajiban ekonomi?
	1. Mengakui sebagai pendapatan saat hibah diterima secara tunai, untuk menghindari distorsi laporan keuangan saat ini.
	2. Mengakui sebagai aset lancar saat perjanjian hibah ditandatangani, meskipun belum ada kewajiban pelaporan yang signifikan.
	3. Mengakui sebagai pendapatan saat proyek dimulai, karena ini mencerminkan pencapaian kondisi substantif hibah.
	4. Tidak mengakui sama sekali hingga proyek selesai, untuk menjaga prinsip konservatisme dalam penganggaran
	5. E. Mengakui sebagai liabilitas sementara, kemudian mengonversinya menjadi pendapatan setelah audit eksternal.
2. Sebuah kementerian menyusun APBN dengan alokasi belanja modal Rp 500 miliar untuk pengadaan aset tetap. Namun, karena keterlambatan tender, hanya Rp 300 miliar yang terealisasi pada akhir tahun. Analisislah implikasi terhadap laporan keuangan pemerintah: bagaimana perbedaan antara anggaran dan realisasi ini memengaruhi evaluasi efisiensi pengelolaan anggaran menurut prinsip value for money dalam akuntansi sektor publik?
3. Realisasi rendah menunjukkan inefisiensi, sehingga harus dicatat sebagai pengeluaran tidak produktif untuk audit BPK.
4. Perbedaan ini tidak memengaruhi laporan, karena anggaran bersifat fleksibel dan dapat dialihkan ke tahun berikutnya tanpa sanksi.
5. Ini mencerminkan penghematan anggaran, yang harus dievaluasi sebagai efisiensi tinggi dalam rasio realisasi belanja.
6. Realisasi rendah memerlukan penyesuaian anggaran melalui PPAS, untuk menjaga keseimbangan fiskal dan menghindari defisit.
7. Implikasinya adalah peningkatan liabilitas tersembunyi, sehingga aset tetap harus dicatat secara akrual meskipun belum dibeli.
8. Pemerintah kota memiliki aset tetap berupa gedung sekolah yang dibangun tahun lalu dengan biaya Rp 200 miliar. Saat ini, gedung tersebut mengalami kerusakan akibat banjir, dan estimasi biaya perbaikan Rp 50 miliar. Dalam akuntansi sektor publik, evaluasilah keputusan akuntansi yang tepat untuk mencerminkan nilai wajar aset ini, mengingat prinsip pengakuan impairment dan dampaknya terhadap pelaporan keuangan daerah?
9. Catat sebagai pengeluaran rutin, karena aset publik tidak memerlukan penilaian impairment secara berkala.
10. Lakukan impairment test dan kurangi nilai buku aset sebesar Rp 50 miliar, untuk menjaga akurasi neraca pemerintah.
11. Abaikan kerusakan karena aset tetap pemerintah bersifat abadi dan tidak depreciable.
12. Transfer biaya perbaikan ke dana cadangan, tanpa memengaruhi nilai aset, untuk menjaga stabilitas anggaran.
13. Tingkatkan nilai aset secara retroaktif, karena perbaikan meningkatkan umur ekonomis dan mendukung prinsip going concern.
14. Dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), terdapat selisih antara pendapatan pajak yang dianggarkan Rp 1.000 triliun dan realisasi Rp 950 triliun. Analisislah bagaimana selisih ini harus dicatat dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK) untuk mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, serta implikasinya terhadap pengambilan keputusan legislatif?
15. Catat sebagai varian anggaran negatif, tanpa penjelasan rinci, karena fokus utama adalah keseluruhan surplus/defisit.
16. Jelaskan penyebab selisih (misalnya, penurunan ekonomi) dan dampaknya terhadap proyeksi fiskal masa depan dalam CaLK.
17. Abaikan selisih karena pajak bersifat estimasi, dan tidak memengaruhi validasi laporan oleh BPK.
18. Reklasifikasi selisih sebagai pendapatan non-anggaran, untuk menghindari kritik dari DPR atas kinerja pemungutan pajak.
19. Tambahkan selisih sebagai liabilitas kontingen, karena ini berpotensi memengaruhi hutang negara di masa depan.
20. Sebuah pemerintah provinsi menerbitkan obligasi daerah senilai Rp 300 miliar untuk pembiayaan infrastruktur, dengan bunga 7% per tahun. Namun, provinsi tersebut mengalami penurunan pendapatan transfer dari pusat. Evaluasilah risiko fiskal ini dalam akuntansi sektor publik: bagaimana pemerintah sebaiknya mengelola pengakuan hutang ini untuk memastikan keberlanjutan keuangan jangka panjang?
21. Akui hutang secara penuh sebagai liabilitas jangka panjang, tanpa mempertimbangkan risiko default, karena obligasi bersifat aman.
22. Lakukan stress testing dalam laporan keuangan untuk mengukur kemampuan pembayaran, dan catat sebagai kewajiban bersyarat jika risiko tinggi.
23. Tunda pengakuan bunga hingga jatuh tempo, untuk menjaga rasio hutang terhadap PDB tetap rendah.
24. Konversi hutang menjadi hibah pusat, sehingga tidak dicatat sebagai liabilitas daerah sama sekali.
25. Catat sebagai aset finansial sementara, karena obligasi dapat dijual kembali untuk mengurangi beban fiskal.
26. Pemerintah desa mengelola Dana Desa (DD) senilai Rp 2 miliar untuk program pemberdayaan masyarakat, tetapi sebagian dana dialihkan untuk bantuan sosial darurat akibat pandemi. Dalam perspektif akuntansi sektor publik, analisislah etika dan implikasi akuntansi dari realokasi ini: bagaimana ini memengaruhi prinsip tujuan khusus dana dan pelaporan akuntabilitas kepada masyarakat?
27. Realokasi diperbolehkan tanpa catatan khusus, karena DD bersifat fleksibel untuk kebutuhan mendesak.
28. Catat sebagai perubahan anggaran dalam laporan realisasi, dengan penjelasan dampak terhadap pencapaian tujuan asli dana.
29. Larang realokasi sepenuhnya, karena melanggar prinsip earmarking dan berisiko sanksi dari Kemendesa.
30. Reklasifikasi sebagai belanja operasional umum, untuk menghindari audit khusus pada dana desa.
31. Tingkatkan dana melalui pinjaman desa, sehingga realokasi tidak memengaruhi saldo DD asli.
32. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ketidaksesuaian dalam pelaporan belanja pegawai seorang kementerian, di mana Rp 100 miliar dicatat ganda. Evaluasilah langkah korektif yang tepat dalam akuntansi sektor publik: bagaimana kementerian sebaiknya menangani temuan ini untuk memperbaiki sistem internal control dan mencegah rekurensi, sesuai dengan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)?
33. Koreksi hanya pada laporan tahun berjalan, tanpa audit ulang, karena kesalahan administratif bersifat minor.
34. Lakukan restatement laporan keuangan sebelumnya dan perkuat SPIP dengan segregasi tugas untuk verifikasi pengeluaran.
35. Abaikan temuan jika tidak memengaruhi surplus anggaran, karena fokus audit adalah pada materialitas keseluruhan.
36. Transfer tanggung jawab ke bendahara umum negara, untuk menghindari beban administratif kementerian.
37. Catat sebagai pengeluaran tambahan untuk biaya audit, sehingga temuan menjadi bagian dari belanja operasional.
38. Dalam era digitalisasi, pemerintah daerah wajib menerbitkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara online. Namun, ada keterlambatan publikasi karena verifikasi data. Analisislah implikasi keterlambatan ini terhadap prinsip transparansi dalam akuntansi sektor publik: bagaimana hal ini memengaruhi kepercayaan publik dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Keuangan Negara?
39. Keterlambatan tidak signifikan, karena publikasi online bersifat opsional dan tidak mengikat secara hukum.
40. Ini melanggar prinsip timeliness, sehingga harus diikuti dengan penjelasan sanksi administratif dalam laporan berikutnya.
41. Percepat publikasi tanpa verifikasi penuh, untuk memprioritaskan akses informasi daripada akurasi data.
42. Ganti dengan ringkasan eksekutif saja, karena laporan lengkap terlalu kompleks untuk masyarakat umum.
43. Integrasikan dengan portal SATU DATA, sehingga keterlambatan diatasi melalui sinkronisasi otomatis antarinstansi.
44. Sebuah BUMN yang dikelola secara komersial mengalami kerugian operasional Rp 50 miliar, sementara entitas pemerintah non-komersial mengalami defisit anggaran serupa. Evaluasilah perbedaan pengakuan kerugian ini dalam akuntansi sektor publik versus swasta: bagaimana pendekatan pemerintah memastikan akuntabilitas publik tanpa memicu kepanikan pasar?
45. Kerugian pemerintah dicatat sebagai pengeluaran biasa, mirip swasta, karena prinsip akrual sama untuk keduanya.
46. Pemerintah fokus pada realisasi anggaran daripada laba rugi, sehingga defisit dievaluasi berdasarkan pencapaian output sosial.
47. Konversi kerugian menjadi subsidi negara, untuk menyelaraskan dengan tujuan komersial BUMN.
48. Abaikan defisit pemerintah karena bersumber dari pajak, tidak seperti kerugian swasta yang memengaruhi pemegang saham.
49. Terapkan impairment aset secara ketat pada pemerintah, seperti swasta, untuk menghindari overstatement aset publik.
50. Pemerintah pusat merencanakan peningkatan belanja sosial Rp 200 triliun, didanai oleh penerbitan surat utang baru. Dalam akuntansi sektor publik, analisislah keberlanjutan fiskal ini: bagaimana rasio hutang terhadap PDB yang meningkat harus dievaluasi dalam Neraca Keuangan Negara untuk mendukung pengambilan keputusan berkelanjutan?
51. Rasio hutang tidak relevan, karena utang negara bersifat sovereign dan selalu aman dari default.
52. Evaluasi melalui batas fiskal 60% PDB (UU Keuangan Negara), dengan proyeksi dampak terhadap generasi mendatang dalam CaLK.
53. Kurangi belanja dengan memotong subsidi, sehingga rasio hutang tetap stabil tanpa evaluasi mendalam.
54. Catat utang sebagai aset likuid, karena dapat dikonversi menjadi investasi produktif jangka panjang.
55. Prioritaskan pembiayaan dari pendapatan non-pajak, sehingga peningkatan belanja tidak memengaruhi neraca hutang.